

NILAI-NILAI KEBANGSAAN DAN ARSIP KEPRESIDENAN

Kita sering mendengar ungkapan “belajar dari sejarah”, “belajarlah dari pengalaman,” sejarah mengajarkan kepada kita, “*Historia Vitae Magistra*” (Sejarah adalah guru kehidupan). Kata-kata orang bijak “masa lalu adalah sejarah, masa datang adalah harapan, masa sekarang adalah kenyataan.” Ciri-ciri bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan jasa pahlawannya, dalam waktu yang sama bangsa tersebut arif terhadap kenyataan dan punya harapan dan obsesi indah untuk masa mendatang. Ungkapan tersebut mengandung arti bahwa sejarah memberi pelajaran bagi kehidupan manusia. Banyak nilai-nilai berharga yang dapat kita petik dari pelajaran sejarah, seperti kebenaran, keadilan, kejujuran, kearifan, keberanian, rela berkorban, dan lain-lain. Jadi sejarah banyak mengajarkan moral, apalagi dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan yang akhir-akhir ini

mengalami penurunan di kalangan generasi mudanya.

Kita lebih senang mengagumi dan membicarakan kepemimpinan bangsa lain seperti Presiden Amerika Serikat Barak Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Korea Selatan, ataupun pemimpin-pemimpin mancanegara lainnya yang menjadi inspirasi generasi sekarang ini. Tidak ada yang salah mengagumi dan mengambil inspirasi dari para pemimpin tersebut. Namun kita jangan lupa kalau kita pernah mempunyai pemimpin yang menginspirasi dunia. Pemimpin yang benar-benar lahir dari rakyat, berjuang dan mempersembahkan pengabdian terbaik bagi nusa dan bangsa. Presiden Soekarno Sang Proklamator yang telah berjuang bahu membahu dengan pejuang-pejuang kemerdekaan lainnya mempersiapkan, memproklamkan, bahkan mengisi kemerdekaan yang diproklamirkannya. Pemimpin yang tidak pernah putus

asa menghadapi berbagai tantangan, godaan dan rintangan, bahkan ketika dibuang oleh penjajah Belanda ke berbagai daerah yang terisolirpun tetap memberikan inspirasi bagi rakyatnya. Presiden Suharto, anak desa yang digelar juga dengan Bapak Pembangunan Nasional pernah membawa bangsa Indonesia menjadi macan asia. Presiden BJ. Habibie putra daerah yang cerdas dan pintar yang menjadi inspirasi dalam memajukan teknologi nasional. Presiden Abdurrahman Wahid, seorang santri yang telah menginspirasi dunia dengan keterbatasannya membela hak-hak kaum minoritas. Sementara Presiden Megawati Soekarno Putri dengan senyuman khasnya menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih dikenal dengan panggilan SBY telah memberikan inspirasi dalam mengembangkan demokrasi. Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan panggilan Jokowi

menunjukkan kepada dunia bahwa siapapun bisa menjadi presiden dengan ciri khas blusukannya.

Mereka semua adalah putra dan putri terbaik bangsa yang lahir dari rahim ibu pertiwi, yang mendapatkan amanah untuk memimpin jutaan rakyat Indonesia. Mereka dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka mendapatkan amanah tersebut dengan usaha dan perjuangan yang luar biasa. Sebagai bangsa yang besar kita harus menghargai jasa mereka, lebih dari itu kita sebagai generasi penerus perjuangannya harus bisa mengambil banyak inspirasi dari apa yang mereka lakukan. Salah satu cara untuk bisa belajar dan mengambil pelajaran dari kepemimpinan mereka adalah melalui arsip yang tercipta pada saat mereka memimpin bangsa ini. Melalui arsip kita bisa mengungkapkan kembali kejayaan masa lalu yang dapat dijadikan sumber inspirasi bagi generasi sekarang. Arsip adalah rekaman kegiatan dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip ibarat dua sisi mata uang, arsip statis bercerita tentang bagaimana masa lalu sebuah bangsa, sedangkan arsip dinamis bercerita bagaimana sebuah bangsa berjalan pada saat sekarang dan yang akan datang. Kedua sisi arsip tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, saling mendukung memberikan kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan tentunya harus memiliki banyak strategi dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini dilakukan agar pemerintah dan masyarakatnya lebih peduli terhadap pengelolaan arsipnya. Ide tentang adanya pengelolaan arsip kepresidenan yang sedang diprogramkan ANRI saat sekarang ini menjadi salah satu strategi ANRI dalam mendukung program pemerintah yang bertekad membangun kembali jati diri bangsa Indonesia melalui program “Revolusi Mental.” Peran ANRI menjadi sangat penting apabila berhasil menjalankan program arsip kepresidenan ini. Selain memiliki khazanah arsip yang lengkap yang terdiri dari semua presiden yang pernah memimpin Indonesia yang bisa dinikmati masyarakat melalui pameran tetap maupun temporer, ANRI juga akan berhasil membangun pengelolaan arsip secara sistematis.

Sebagaimana dikatakan oleh Kepala ANRI, Dr. Mustari Irawan, MPA dalam sebuah wawancara dengan majalah ARSIP, bahwa arsip kepresidenan itu sesungguhnya bertolak dari keinginannya untuk membawa ANRI bisa melakukan transformasi dari arsip sebagai informasi, tetapi tidak berhenti hanya sampai disitu saja, bagaimana kita bisa membangun arsip menjadi sebuah pengetahuan.

Tujuan akhirnya adalah ANRI bisa memberikan kontribusi yang besar kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena memiliki dampak yang sangat luas. “Kalau kita lihat bahwa arsip tentang presiden itu banyak di khazanah kita, ini yang kita coba bangun menjadi entitas informasi yang baru tanpa mengubah *provenance*-nya. Oleh karena itu, konsep tentang arsip kepresidenan adalah bagaimana kita melakukan penelusuran, kemudian kita membuat suatu guide khusus tentang presiden-presiden yang ada di Indonesia mulai dari Presiden Soekarno hingga presiden terakhir yang memerintah sebelum presiden sekarang ini. Nah, itu adalah konsepsi yang pertama, dimana kita

akan melakukan penelusuran dan membangun *guide*-nya kemudian kita dapat mengembangkan aplikasi akses yaitu dengan digitalisasi. Proses yang kedua Setelah digitalisasi itu kita kembangkan sistem aksesnya untuk publik agar masyarakat bisa memanfaatkan. Berikutnya adalah bagaimana kita mengembangkan sistem akses dan guide yang sudah terbangun itu bisa kita tampilkan secara visual yang disebut *permanent exhibition* dalam bentuk diorama,” lanjutnya.

Di berbagai negara arsip kepresidenan dalam konsep yang berbeda dengan ANRI telah berkembang dengan pesat bahkan suatu hal yang biasa bagi negara-negara tersebut. Di Afrika Selatan ada The Nelson Mandela Centre Of Memory, Amerika Serikat dengan *Presidential Archives and Leadership Library*. Yang lebih menarik apa yang dikembangkan oleh Korea Selatan dengan konsep Presiden Archives yang juga menjadi inspirasi bagi Kepala ANRI dalam mengembangkan Arsip Kepresidenan yang ada di ANRI. *National Archives of Korea* (NAK) mengelola dan mengemas sistem informasi arsip yang berkenaan dengan kebijakan dan aktifitas seorang presiden berikut pelaksanaan tugas dan fungsi dari institusi yang memfasilitasi presiden secara langsung, di Indonesia tugas dan fungsi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden dan Sekretariat Militer. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kepala ANRI bahwa, di beberapa negara yang maju, perihal arsip kepresidenan yang ditampilkan dalam pameran permanen sudah merupakan hal yang lumrah walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda. Seperti di Malaysia, ada yang kita sebut dengan memorial dari masing-masing perdana menteri, di Korea ada yang dinamakan dengan arsip kepresidenan. “Saya terinspirasi dan termotivasi dari Korea



Kepala ANRI Mustari Irawan

“
**Kalau kita lihat
bahwa arsip tentang
presiden itu banyak
di khazanah kita,
ini yang kita coba
bangun menjadi
entitas informasi yang
baru tanpa mengubah
provenance-nya**
”

dan mereka dapat menjadikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita dan bagi sebuah bangsa,” tambahnya.

Di Indonesia sendiri arsip kepresidenan telah dikembangkan oleh yayasan maupun keluarga presiden dengan berbagai warna dan ciri khas masing-masing presiden tersebut. Di Bali ada Museum Presiden Soekarno,

di Yogyakarta ada Museum Presiden Suharto. Sementara Presiden BJ. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masing-masing mengembangkan museum dalam ukuran yang lebih kecil sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat. Yang paling komplis apa

yang telah digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dengan Balai Kirti, yang menampilkan berbagai arsip maupun benda bersejarah peninggalan enam mantan Presiden Republik Indonesia. Arsip kepresidenan yang akan dibangun oleh ANRI haruslah berbeda dengan apa yang telah dibangun oleh lembaga lainnya. Menyajikan hal yang berbeda dan menjadi sumber rujukan utama dalam mempelajari kepemimpinan presiden RI dari masa ke masa. Kehadiran arsip kepresidenan dapat menjadi pemersatu perbedaan antara anak bangsa sebagai mana Visi ANRI “menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa yang akan dicapai pada tahun 2025.”

Sebagaimana dikatakan oleh Mustari Irawan, bahwa tujuan dibangunnya arsip kepresidenan adalah untuk penyelamatan dan pemersatu bangsa. ANRI ingin menarik arsip kepresidenan di beberapa *provenance*-nya yang memang belum lengkap di Arsip Nasional RI. Sementara ini arsip kepresidenan yang sudah ada di ANRI adalah pada jaman pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan SBY. ANRI belum mempunyai arsip untuk masa pemerintahan Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, Megawati, dan yang terakhir Pak Jokowi, sehingga kita perlu melakukan kegiatan penyelamatan arsip pada masa presiden-prsiden tersebut. Tentu saja ini akan memperkaya khasanah ANRI, sudah pasti kalau ada arsip yang rusak kita bisa melakukan restorasi. “Hal tersebut pada dasarnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Kearsipan, bagaimana kita bisa meningkatkan pengelolaan dan memperkaya khasanah kita, yang tujuannya adalah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat itu artinya sangat luas sekali. Masyarakat yang berasal dari akademik seperti peneliti, dosen, dan sebagainya atau masyarakat-masyarakat yang ingin

LAPORAN UTAMA

menggunakan atau melihat arsip itu sebagai suatu proses pembelajaran,” lanjut Mustari Irawan.

Dari segi tampilan layanan berupa pameran Arsip Kepresidenan ANRI akan menampilkan sosok presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan dari segi humanis seorang presiden. “Sebetulnya kami ingin melihat presiden itu dalam satu sosok atau figur dari tiga sudut pandang itu, yang pertama sebagai kepala pemerintahan (eksekutif), lalu presiden sebagai kepala negara, dan presiden dari sisi humanismenya. Baik untuk pemerintahan maupun kepala negara, kita akan berkoordinasi dan kita akan melacak arsip-arsip tersebut dari beberapa instansi yang terkait, terutama dalam hal ini adalah sekretariat negara. Langkah selanjutnya kita melakukan rapat koodinasi yang nanti diarahkan agar kita bisa memperoleh arsip-arsip mana dari presiden yang ada di masing-masing lembaga. Setelah itu baru kita melakukan akuisisi atau penyelamatan. “Jadi yang terkait dengan presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan itu kita koordinasikan dengan beberapa kementerian atau lembaga yang terkait. Sementara kalau dari sisi humanisme nanti kita akan coba mendekati beberapa keluarganya yang mungkin menyimpan suatu momen yang khusus yang mungkin masyarakat dan kita semua belum mengetahui bahwa ada momen di masa presiden itu misalnya dia suka memancing, dia suka mengumpulkan lukisan, dia suka membuat puisi atau lagu, atau ada yang suka membuat *joke* atau lelucon. Nah sisi-sisi inilah yang harus kita gali, ini menjadi sangat penting sekali dan memang ada bagian-bagian khasanah kita yang seperti itu nantinya sebagian akan kita tampilkan dalam *permanent exhibition* supaya masyarakat kita tahu dan bisa melihat dan akan sangat menarik jika kita dapat mengemasnya sedemikian rupa sehingga masyarakat



Display di salah satu hall Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa yang menampilkan foto para Presiden RI sedang tersenyum

dapat dengan utuh melihatnya. Siapa lagi yang mau menghargai pemimpin nasional kalau bukan kita sebagai rakyatnya,” tambah Kepala ANRI.

Permanent exhibition hanyalah salah satu cara mengemas arsip kepresidenan menjadi sebuah sajian yang bisa dinikmati oleh masyarakat tetapi yang paling penting adalah bagaimana proses pengelolaan arsip kepresidenan bisa mengalir dengan baik sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga negara yang mengelola arsip kepresidenan tersebut. Sebagai pencipta arsip Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden, dan Sekretariat Militer bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsip dinamis baik arsip vital, arsip aktif, maupun arsip inaktif (pasal 9 (ayat) 2 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan). Sedangkan pengelolaan arsip statisnya menjadi tanggungjawab lembaga kearsipan dalam hal ini Arsip Nasional Republik Indonesia ((pasal 9 (ayat) 2 Undang-Undan No. 43 Tahun

2009 Tentang Kearsipan). Mengalirkan arsip statis dengan baik ke lembaga kearsipan tentunya bukan merupakan pekerjaan yang mudah, hal ini memerlukan kesadaran dari lembaga pencipta arsip, juga diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memahami pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis di masing-masing lembaga tersebut. Terkait dengan SDM tersebut Kepala ANRI mengatakan, bahwa secara internal akan melakukan transformasi bagaimana menjadikan arsip bukan hanya sebatas sebagai informasi saja, tetapi menjadikannya pengetahuan. Hal Ini memang mudah untuk ditulis, tetapi susah dalam implementasinya karena belum tentu SDM di ANRI dapat memahami secara substansi apa yang ingin kita capai. “Jadi, keinginan saya bagaimana kita semua menggali asset arsip ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah sebetulnya kebijakan saya. Oleh karena itu, secara garis besarnya saya tuangkan di dalam visi dan misi saya

dan sudah ada di dalam Peraturan Kepala (Perka) ANRI." tandasnya.

Visi dan misi yang dimaksud adalah selaras dengan Renstra yang sudah dibuat, lebih jauh lagi selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMPN) 2015-2019, dimana ANRI masuk ke dalam pengarusutamaan. Ini berarti bahwa ANRI sudah harus melakukan perubahan. Perubahan ini hanya bisa dilakukan bila didukung oleh berbagai macam sumber daya termasuk sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud disini adalah SDM yang mau terus-menerus belajar. Ini *learning process* bagi pegawai, karena proses itu tidak berhenti sampai disitu, tetapi terus belajar.

Strategi yang bisa dilaksanakan dalam pengelolaan SDM yang bisa mendukung program arsip kepresidenan ini adalah dengan menempatkan Arsiparis pada setiap pencipta arsip agar bisa memantau arsip dari sejak penciptaan sampai dengan penyusutannya. Namun hal ini bukan hal yang mudah dilakukan mengingat sampai saat sekarang ANRI sendiri masih kekurangan tenaga arsiparisnya. Penempatan arsiparis tidak dilakukan secara terus menerus tetapi dilakukan dengan pengiriman arsiparis senior untuk melakukan pembinaan terhadap tenaga kearsipan yang ada di lembaga tersebut, selain menyediakan SDM yang juga sama-sama bekerja dalam melakukan penataan arsip di pencipta arsip tersebut. Berdasarkan pengalaman bahwa pembinaan tanpa didampingi dalam penataan arsipnya kurang memberikan dampak yang menggembirakan dalam pengelolaan arsipnya. Jadi didampingi sambil sama-sama bekerja melakukan pengelolaan arsipnya, atau istilahnya *learning by doing*.

Karena ini menyangkut pekerjaan intelektual dan koordinasi antara lembaga negara maka diperlukan

arsiparis yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang memadai di bidang kearsipan, pemerintahan dan administrasi negara, tentunya sebelum ditempatkan mereka diberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai.

Selain membutuhkan dukungan SDM secara internal maupun eksternal, maka koordinasi dan sinergitas antara lembaga negara harus terus dilakukan bahkan harus dilakukan secara masif, tidak hanya kepada lembaga kepresidenan tetapi kepada seluruh lembaga pemerintah, baik kementerian, non kementerian, pusat maupun daerah. Karena semua lembaga-lembaga tersebut menjalankan tugas pemerintah yang sudah diamanatkan oleh rakyat dan tentunya ada kaitannya dengan kegiatan kepresidenan. Terkait dengan hal ini Kepala ANRI mengutarakan konsepnya, bahwa secara eksternal ingin membawa semua unit kearsipan organisasi pemerintah (kementerian/lembaga) agar peduli terhadap proses bagaimana seorang presiden melaksanakan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Salah satu caranya adalah memberikan dorongan kepada lembaga kepresidenan agar mereka memberikan perhatian terhadap arsip yang tercipta, yang nanti akan bisa lakukan akuisisi atau penyelamatan.

Dengan program arsip kepresidenan ini diharapkan akan dapat meningkatkan nilai-nilai kebangsaan bangsa Indonesia sebagaimana digambarkan oleh Mustari Irawan, bahwa ada tiga manfaat pembuatan arsip kepresidenan. Yang pertama bisa menjadi suatu pusat kajian terhadap presiden kita, karena kalau kita berbicara tentang presiden sebagai kepala pemerintahan tentu banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Begitu juga menyangkut sosial, ekonomi, politik, budaya, dan semua aspek kehidupan itu menjadi tanggung jawab presiden. Inilah hal

yang menarik untuk dijadikan suatu kajian bagi para peneliti. Yang kedua tentu saja yang menginginkan ini sebagai proses pembelajaran. Artinya, bagi masyarakat memberikan sesuatu kesadaran dan pencerahan tentang pemimpin bangsanya. Ini memang saya inginkan nanti baik yang melakukan penelitian maupun melihat dari konteks ekshibisi permanen dalam sosialisasi itu bisa memberikan pemahaman. Jadi, kalau misalnya nanti bisa terwujud masyarakat bisa belajar tentang pemimpinnya. Misalnya Presiden Soekarno kapan dan dimana ia dilahirkan, siapa orang tuanya, tempatnya dimana, kemudian icon-icon apa yang spesifik menggambarkan sosok Soekarno. Ini kalau saya mengatakan *learning of history* (belajar sejarah). Pemimpin dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita bisa belajar dari para pemimpin. Jadi, yang positif bisa kita tingkatkan... yang negatif bisa jadi positif agar tidak terulang lagi. Yang ketiga, barangkali ini yang saya katakan edit valuesnya/ nilai tambahnya adalah kalau misalkan pada bagian ketiga yang kita sebut permanent exhibition dalam bentuk diorama itu kita bangun menjadi salah satu objek wisata.

Permanent exhibition arsip kepresidenan rencananya akan dibangun di Gedung Arsip Nasional Gajah Mada. Arsip kepresidenan nantinya akan memvisualisasikan seluruh arsip-arsip yang ada dan akan menjadi bagian dari objek wisata karena Gedung Gajah Mada adalah pintu pertama sebelum turis mengunjungi kota tua. Jadi, itu akan menarik sekali sebelum mereka masuk kesana...mereka mengunjungi Gedung Gajah Mada untuk melihat *permanent exhibition*. Jadi, inilah salah satu nilai plus yang saya kira bukan saja kita berbicara masalah nilai-nilai kebangsaan yang sangat penting sekali, tetapi juga ada nilai tambahnya terkait dengan objek wisata. "Nilai kebangsaan yang bisa

LAPORAN UTAMA

kita bangun adalah bahwa masyarakat bisa mengetahui bagaimana pemimpin bangsanya, atau bahasa mudahnya masyarakat kita bisa belajar dari pemimpin bangsanya,” ungkap Mustari Irawan.

Disamping *permanent exhibition*, program arsip kepresidenan merupakan program penyelamatan arsip yang telah direncanakan dengan baik, dari arsip itu diciptakan, digunakan dan dipelihara, disusutkan, sampai arsip diakuisisi menjadi arsip statis telah melalui proses yang sebagaimana mestinya. Ada 4 (empat) instrumen yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga pencipta arsip apabila ingin memiliki pengelolaan arsip dinamis yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Yang pertama memiliki Tata Naskah Dinas, yang kedua memiliki Klasifikasi Arsip, yang ke tiga memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA), dan yang terakhir memiliki Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip. Secara keseluruhan belum semua lembaga pencipta arsip memiliki 4 (empat) instrumen pengelolaan arsip dinamis, untuk itu perlu pembinaan yang masif agar 4 (empat) instrumen tersebut dimiliki oleh semua lembaga pencipta arsip.

Selain melakukan pembinaan ANRI pada tahun ini telah meluncurkan program audit kearsipan bagi seluruh lembaga pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Hal ini dilakukan mengingat lembaga pemerintah sampai saat ini masih kurang memperhatikan dalam pengelolaan arsipnya. Dengan adanya audit kearsipan ini diharapkan akan menimbulkan kesadaran bagi lembaga-lembaga tersebut baik pusat maupun daerah untuk memelihara dan mengelola arsipnya sesuai dengan prinsip dan kaidah kearsipan yang berlaku. Dan pada akhirnya lembaga-lembaga tersebut akan menyerahkan arsip statisnya secara sukarela kepada lembaga kearsipan, termasuk arsip

kepresidenan yang tersebar diseluruh kementerian dan lembaga.

Salah satu lembaga kepresidenan yang menyatakan kesiapannya terkait dengan pembangunan arsip kepresidenan oleh ANRI adalah Sekretariat Kepresidenan hal ini terungkap dari diskusi antara Kepala ANRI, Mustari Irawan dengan Kepala Sekretariat Kepresidenan, Dr. Darmansjah Djumala, MA. Beberapa waktu yang lalu. Dalam hal pengelolaan arsip dinamis sekretariat kepresidenan telah melakukannya dengan baik, walaupun masih perlu banyak pembinaan, terutama pada masalah pengelolaan arsip dinamis terkait dengan regulasi yang menjadi landaasan hukum penerapannya. “Kalau menurut informasi yang saya peroleh dari pertemuan saya dengan Kepala Sekretariat Kepresidenan, beliau mengatakan bahwa pengelolaan arsip dinamisnya sudah cukup baik. Tetapi kita belum mengetahui secara detainya, kita berbicara secara umum belu detainya. Kementerian atau lembaga sebagai pencipta arsip yang mengelola arsip dinamisnya itu harus selalu kita bina dan harus kita dorong terus untuk mengelolah arsip dinamisnya dengan sedemikian rupa agar terkelola dengan baik,” lanjut kepala ANRI.

Kepala Sekretariat Kepresidenan, Dr.DarmasjahDjumala,MAmenyambut baik adanya gagasan untuk membuat program arsip kepresidenan ini, “Saya kira ini merupakan hal yang baik, tetapi harus kita bicarakan dengan lebih luas lagi karena menyangkut beberapa instansi lain dan berbagai pihak terkait. Mengingat arsip-arsip kita yang bersifat fisik seperti benda-benda bersejarah sudah disimpan pada *schattered*, terpecah-pecah di beberapa museum. Kalaupun itu akan dibawah oleh ANRI, saya kira itu perlu pemikiran, persiapan, dan perlu pembicaraan karena menyangkut instansi lain,” tegas Darmansjah. Selama ini lembaga kepresidenan telah

menjalin kerjasama yang baik dengan ANRI terutama dalam hal pembinaan kearsipannya, hasil dari kegiatan ini dibuktikan dengan penyerahan arsip 10 (sepuluh) tahun masa pemerintahan Presiden SBY. sebelum mengahiri masa pemerintahannya. “Sudah pernah kita minta berdasarkan permintaan tetapi dengan kesadaran sejarah kita beberapa bundel, beberapa even tertentu sudah kita serahkan kepada ANRI. Seperti tahun lalu, di era kepemimpinan SBY, Sekretariat Presiden menyerahkan 1 bundel selama 10 tahun kepada ANRI untuk dijadikan arsip nasional,” lanjutnya.

Kesadaran untuk menyerahkan arsip statisnya kepada ANRI harusnya dimiliki oleh setiap pemimpin negara, maupun pemimpin lembaga pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Para pemimpin kita dahulu memiliki kesadaran sejarah yang cukup tinggi dalam mengarsipkan kegiatannya. Hal ini dibuktikan walaupun mereka tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk menciptakan, memelihara dan menyimpan arsipnya, banyak arsip pemimpin dahulu yang bisa kita pelajari dan manfaatkan arsipnya baik itu arsip kertas, foto, maupun film. “Nah, itu muncul dari kesadaran pemimpin kita terdahulu, kita belajar dari para pemimpin. Dari konteks tersebut, walaupun belum ada undang-undang tetapi pemimpin kita mulai dari tahun 1945-1971 sudah menyimpan arsip dan sudah dimiliki oleh ANRI. Inilah yang dimaksud dengan adanya kesadaran bersejarah, kesadaran berarsip, kesadaran berdokumentasi walaupun tanpa Undang-undang,” Tuturnya.

Terkait dengan manfaat keberadaan arsip kepresidenan tersebut ditegaskan oleh Darmansjah, bahwa generasi muda dapat belajar banyak dari pemimpinnya, “bahwa hak dari generasi muda untuk memperoleh

“ bahwa hak dari generasi muda untuk memperoleh informasi dari arsip itu sendiri, dalam konteks kita mendefinisikan arsip, arsip itu dapat kita lihat dalam pengertian statis dan pengertian dinamis ”



Kepala Sekretariat Kepresidenan,
Darmansjah Djumala

informasi dari arsip itu sendiri, dalam konteks kita mendefinisikan arsip, arsip itu dapat kita lihat dalam pengertian statis dan pengertian dinamis. Arsip yang dapat dikatakan statis seperti istilah orang karena arsip merupakan saksi bisu dari sepotong sejarah. Tetapi kalau kita melihat dari aspek dinamis, dinamika arsip itu merupakan sumber ilmu pengetahuan, adalah cermin peradaban. Dalam arti bahwa arsip dalam konteks dinamis harus diberikan akses seluas-luasnya kepada generasi muda, kepada peneliti, kepada sejarawan, kepada akademisi untuk mempelajari arsip ini untuk dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Ketika dia mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, disanalah arsip menjadi cerminan peradaban bangsa, bahwa kita adalah orang yang menghargai ilmu pengetahuan berdasarkan arsip yang sudah disajikan oleh ANRI. Jadi, saya melihat bahwa akses generasi muda kepada arsip harus dijamin, dalam rangka kita mengembangkan peradaban bangsa kita sendiri,” tambahnya.

Pembangunan arsip kepresidenan

yang digagas ANRI memang memerlukan pemikiran dan kajian yang cukup mendalam terkait dengan tampilan, substansi dan hal-hal lain yang terkait dengan pembangunan arsip kepresidenan ini. Walaupun ANRI pernah mempunyai pengalaman dalam hal membangun Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Patut dipelajari juga sebagai bahan masukan apa yang telah dilakukan oleh Museum Kepresidenan “Balai Kirti,” di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat. Museum yang digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono ini diresmikan pada tahun 2014, namun gagasannya sudah dicetuskan sejak tahun 2004, awal masa kepemimpinan Presiden ke 6 Republik Indonesia SBY pada periode pertama sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Museum Kepresidenan “Balai Kirti,” Pustanto, bahwa ide pendirian museum kepresidenan ini sebenarnya ada pada Tahun 2004 saat Bapak SBY menjadi Presiden, setelah itu dimatangkan lagi tahun 2014. Empat kementerian yaitu: Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional RI, Kementerian Pekerjaan Umum. SBY bercerita bahwa

beliau melihat di negara lain ada semacam tempat untuk mengetahui jejak, persoalan, termasuk prestasi-prestasi presiden yang masuk dalam satu bangunan, semacam Museum Purna Bhakti Pertiwi, sehingga akan ditemukan misalnya kemegahan seorang Kennedy bagi Amerika dan dunia. “Dari konsep-konsep itulah cikal bakal pendirian museum kepresidenan. Lantas, Kementerian Pekerjaan Umum dipersilakan untuk mempersiapkan lahannya, lalu pada akhirnya ditentukanlah di Istana Bogor. Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan bangunan. Dimulai dengan sayembara desain bangunan museum. Semula ada tiga pemenang, kemudian Bapak SBY memilih bangunan yang model seperti ini. Meskipun banyak pro dan kontra tentang desain museum ini, dibiarkan saja, pembangunan tetap berjalan, Bangunan ini kontras sekali dengan lingkungannya. Pada prinsipnya kawasan ini merupakan cagar budaya, tidak boleh ada bangunan baru di dalamnya sehingga banyak penggiat kawasan heritage yang menentang, namun dibiarkan saja, baru terasanya setelah bangun setahun dua tahun ada manfaatnya, sekarang saja sudah

LAPORAN UTAMA

terasa,” lanjut Pak Pustanto.

Pembangunan Museum “Balai Kirti” sendiri merupakan sinergisitas beberapa lembaga pemerintah yang realisasinya dimudahkan karena gagasannya dan idenya dari seorang presiden RI. Kontennya pun diisi oleh lembaga yang memiliki substansi materinya, seperti Perpustakaan Nasional RI bertugas mengisi perpustakaan, Kemendikbud mengisi hal-hal yang terkait dengan budayanya. “Meskipun konten itu sendiri bisa dikatakan aslinya masih kurang banyak, seperti arsip walaupun ada aslinya tapi tidak bisa diambil aslinya, hanya bisa duplikasinya. Tanda-tanda jasa yang berada di museum ini hanya sebagian yang asli. Adapun proses penambahan koleksi museum kepresidenan dilakukan dengan pendekatan kepada keluarga Presiden yang langsung dihubungi oleh Presiden SBY. Setelah setuju, bahan tersebut diambil oleh ajudannya. Setelah itu dilakukan penelaahan apalagi bahan yang harus masuk museum, diinventarisasi, dipilih, kemudian diputuskan yang akan masuk museum,” tambah kepala museum tersebut.

Dalam membangun arsip kepresidenan nanti ANRI perlu juga mencontoh berbagai langkah yang sudah dilakukan oleh tim yang sudah merealisasikan Museum Kepresidenan “Balai Kirti” ini. Walaupun pekerjaan membuat museum ini dimudahkan karena yang mempunyai ide adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Metode pengumpulan bahan atau materi yang terdapat dalam museum kepresidenan tersebut sebenarnya agak lebih mudah karena Presiden yang menjabat pada masa itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sangat dominan peranannya. Tentunya kami punya tim riset yang mencari informasi untuk mengumpulkan benda yang mengisi museum kepresidenan. Yang paling penting itu tadi, kita harus pandai menjaga perasaan antara Presiden



Kepala Museum Kepresidenan RI “Balai Kirti,” Pustanto

satu dengan Presiden lainnya. Di sini kita tidak akan memunculkan peristiwa Super Semar, Naskah atau Dokumen tentang Lepasnya Timor Timur,” tambah Pustanto.

Menurut Kepala Museum Kepresidenan “Balai Kirti” tujuan dibangunnya museum adalah untuk agar anak-anak dan para pemuda mengetahui tentang jejak perjalanan para presiden yang memimpin negeri ini. Anak-anak dan para pemuda yang berkunjung ke Museum Kepresidenan “Balai Kirti” diharapkan akan mengetahui prestasi, perjuangan, serta persoalan yang dihadapi presiden semasa ia menjabat. Dengan demikian, setelah berkunjung anak-anak dan para pemuda akan terinspirasi akan sosok para presiden, bagaimana Bapak Presiden Soeharto yang masa kecilnya di pedesaan bisa menjadi seorang presiden. Demikian halnya Bapak Habibie yang dikenal sebagai presiden yang cerdas dengan prestasi yang diakui pemerintah Jerman, bagaimana Presiden Soekarno bisa menginspirasi dunia dalam meraih kemerdekaannya. “Setelah berkunjung ke Museum Kepresidenan Balai Kirti, generasi

sekarang diharapkan bisa melanjutkan perjalanan membangun negeri dengan lebih baik daripada masa sebelumnya dan masa sekarang,” tambahnya.

Secara implementasi program arsip presiden ini harus didukung oleh payung hukum yang kuat agar bisa memberikan dampak yang lebih luas, walaupun secara Undang-Undang sudah memiliki dasar yang kuat sebagaimana yang diutarakan oleh Kepala ANRI, bahwa Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan mengamanatkan kepada Arsip Nasional RI untuk melakukan penyelenggaraan kearsipan, yaitu keseluruhan kegiatan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam satu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Termasuk dalam hal pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statisnya. Di dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan tentang kearsipan ini peran lembaga pemerintah sebagai unit pencipta yang melakukan pengelolaan arsip dinamis, serta lembaga kearsipan yang melakukan pengelolaan arsip statis telah dibagi dengan baik sekali, dan apabila peran tersebut bisa dilaksanakan dengan baik maka menyusun program arsip kepresidenan bisa dilaksanakan dengan mudah. Namun pada kenyataannya masih banyak lembaga negara, baik lembaga pencipta maupun lembaga kearsipan yang belum memahami dan melaksanakan undang-undang kearsipan tersebut, sehingga memerlukan suatu payung hukum lain lagi seperti Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Keputusan maupun Peraturan Menteri agar program arsip kepresidenan ini berdampak bisa luas. “Sambil menunggu Inpres maupun Perpresnya dibuat, maka



Arsip foto Presiden RI yang ditampilkan di Museum Kepresidenan RI "Balai Kirti"

hal yang paling mudah adalah mengeluarkan Peraturan Kepala ANRI tentang program arsip kepresidenan ini, dengan rujukan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang kearsipan yang telah ada," lanjut kepala ANRI.

Pembangunan arsip kepresidenan ditargetkan 5 (lima) tahun, "5 (lima) tahun saya berharap sudah selesai dan apabila sudah dianggarkan maka kita akan dapat melakukan langkah, di samping saya nanti mengembangkan apa yang disebut dengan *Green Park of Archives*. Dan itu saya kira prosesnya sangat panjang sekali mudah-mudahan dapat dilanjutkan paling tidak saya dapat memberikan pondasi yang kuat. Ada arsip kepresidenan, ada sekolah tinggi ilmu kearsipan (stiker) dan tidak kalah pentingnya ada depo yang selaras dengan lingkungan. Kenapa depo,

karena 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun yang akan datang depo sekarang akan penuh. Kalau saja kementerian/ lembaga itu sadar untuk menyerahkan dan menyimpan arsip statisnya kepada ANRI rutin setahun 2 (dua) kali bisa dibayangkan berapa banyak arsip yang akan disimpan di ANRI, maka diperlukan depo arsip statis yang bisa menampung arsip sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang akan datang," tegas Kepala ANRI.

Merealisasikan program arsip kepresidenan yang digagas oleh ANRI bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan hal yang mustahil. Yang paling penting seluruh komponen organisasi ANRI bisa dan mau bersinergi. Sinergi secara internal maupun secara eksternal dengan semua lembaga terkait. Program arsip kepresidenan ini sejatinya menjadi kebanggaan dan cita-cita bersama yang perlu

diwujudkan. Betapa indahnya anak bangsa dimasa yang akan datang bisa belajar dari semua arsip kepresidenan yang disajikan. Belajar bagaimana para pemimpin mewujudkan kemerdekaan, membangun dan mengisi kemerdekaan yang diraih. Bahwa dalam meraih dan mengisi kemerdekaan diperlukan pengorbanan darah, air mata, jiwa dan raga. Bahwa menjadi seorang pemimpin tidak harus berasal dari mereka yang memiliki kecukupan harta, pendidikan tinggi, darah biru dan presidikat istimewa lainnya. Tetapi siapa saja bisa menjadi Presiden Republik Indonesia, asal mempunyai cita-cita dan usaha keras semua bisa menjadi Presiden. Generasi sekarang dan yang akan datang akan bisa mengambil inspirasi dari arsip kepresidenan tersebut.

Pada akhirnya kepada semua lembaga pencipta arsip di pusat maupun di daerah diharapkan dengan sukarela untuk menyerahkan dan menyimpan arsip statisnya kepada lembaga resmi yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 53 (ayat) 1, bahwa lembaga negara tingkat pusat wajib menyerahkan arsip statisnya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Konsekwensinya apabila lembaga negara tidak taat terhadap ketentuan tersebut bisa mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkatannya. Sebab negara telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar dalam memelihara dan melestarikan arsip statis tersebut. Jangan ada lagi lembaga pencipta menyimpan arsip statis yang merupakan marwah dan jati diri bangsa, sebagai warisan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Asal mau pasti bisa, dan sekali layar terkembang pantang surut kembali. Selamat berjuang merealisasikan arsip kepresidenan sebagai bukti kecintaan terhadap tanah air tercinta. (MI)